

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Kompetensi Aparatur Desa

2.1.1.1 Pengertian Kompetensi Aparatur Desa

Wyatt dalam Suparyadi (2015:243) mengemukakan kompetensi merupakan kombinasi dari keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge), dan perilaku yang dapat diamati dan diterapkan secara kritis untuk suksesnya sebuah organisasi dan perestasi kerja serta kontribusi pribadi karyawan terhadap organisasinya. Menurut Boyatzis dalam Suparyadi (2015:242) mengemukakan kompetensi adalah kapasitas yang ada pada seseorang yang dapat membuat orang tersebut yang mampu memenuhi apa yang disyaratkan oleh pekerjaan dalam suatu organisasi sehingga organisasi tersebut mampu mencapai hasil yang diharapkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016) pengertian aparatur sebagai berikut: “Aparatur adalah perangkat, alat (negara, pemerintah); para pegawai (negeri); negara alat kelengkapan negara, terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari; pemerintah pegawai negeri; alat negara; aparatur negara”.

Berdasarkan dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan menurut penulis bahwasannya kompetensi aparatur desa merupakan suatu kemampuan yang memiliki pegawai pemerintah yang didasari dengan keterampilan dan pengetahuan dalam mengemban tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus pemerintahan desa.

2.1.1.2 Tipe-tipe Kompetensi

Menurut Wibowo (2010:328), ada beberapa tipe kompetensi yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Planning Competency*

Dikaitkan dengan tindakan tertentu seperti menetapkan tujuan, menilai resiko dan mengembangkan urutan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu.

2. *Infulence Competency*

Dikaitkan dengan tindakan seperti mempunyai dampak pada orang lain, memaksa membuat keputusan tertentu dan memberi inspirasi untuk bekerja menuju organisasional.

3. *Communication competency*

Bentuk kemampuan berbicara, mendengarkan orang lain, komunikasi tertulis dan nonverbal.

4. *Interpersonal competency*

Meliputi empati, persuasi, negosiasi, manajemen konflik dan menghargai orang lain.

5. *Thinking competency*

Berkenaan dengan berfikir strategis, berfikir analitis, berkomitmen terhadap tindakan dan membangkitkan gagasan kreatif.

2.1.1.3 Karakteristik Kompetensi

Menurut Wibowo (2016:273) terdapat empat tipe karakteristik dalam kompetensi yaitu sebagai berikut:

1. Motif adalah ssesuatu yang secara konsisten dipikirkan atau diinginkan orang yang menyebabkan tindakan.
2. Sifat adalah karakteristik fisik dan respons yang konsisten terhadap situasi atau informasi.
3. Konsep diri adalah sikap atau citra diri seseorang. Percaya diri atas keyakinan orang bahwa mereka dapat efektif dalam setiap diri seseorang.
4. Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki orang dalam bidang spesifik. Pengetahuan juga merupakan kompetensi yang kompleks.

2.1.1.4 Pengukuran Kompetensi Aparatur Desa

Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 22 Tahun 2011 menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia mencakup dimensi:

1. Pengetahuan (*knowledge*) yaitu informasi yang dimiliki seseorang pegawai untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan kemampuannya. Pengetahuan pegawai turut menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya dan seorang pegawai yang mempunyai pengetahuan yang cukup dapat

meningkatkan efisiensi perusahaan.

2. Keterampilan (*Skill*) yaitu suatu upaya dalam melaksanakan tugas yang diberikan perusahaan kepada seorang pegawai dengan baik. Misalnya keterampilan dalam bekerja sama dengan memotivasi orang lain, baik secara individu maupun kelompok. Keterampilan ini sangat diperlukan bagi pegawai yang sudah menduduki jabatan tertentu karena keterampilan ini dapat berkomunikasi .
3. Sikap (*attitude*) yaitu pola pikir seorang pegawai dalam peran melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perusahaan. Apabila mempunyai pegawai sifat mendukung pencapaian organisasi maka secara otomatis segala tugas yang dibebankan kepadanya dilakukan dengan sebaik-baiknya.

2.1.2 Partisipasi Masyarakat

2.1.2.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan dimulai dari kegiatan perencanaan dan pelaksanaan sampai dengan tahap evaluasi pembangunan (Solekhan, 2014:141). Partisipasi juga salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat, dimana partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat

(Atiningsih dan Ningtyas, 2019). Masyarakat juga disebut sebagai pemangku kepentingan utama yang harus diprioritaskan dalam pelaksanaan kebijakan organisasi publik terutama implementasi pembangunan desa-desa sehingga proses implementasi pembangunan tepat pada sasaran (Wafirotin dan Septiviasuti, 2019).

Partisipasi masyarakat desa menurut peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pada pasal 127, partisipasi masyarakat desa dapat dilakukan dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa yang dilaksanakan secara swkelola oleh desa, dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan potensi guna mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa yang dilakukan melalui musyawarah desa.

Jadi dapat disimpulkan menurut penulis bahwasannya partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam suatu pembangunan desa dari awal sampai tahap akhir. Dimana masyarakat membuat keputusan di setiap program pembangunan dan mengevaluasi masalah maka pembangunan desa tidak akan tercapai dengan baik.

2.1.2.2 Hambatan Penetapan Partisipasi Masyarakat

Solekhan (2014:97) mengemukakan tiga hambatan utama dalam penetapan partisipasi sebagai berikut:

1. Hambatan struktural yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang kondusif untuk dilaksanakannya partisipasi. Ditandai dengan kurangnya kesadaran penting mengenai partisipasi dan kebijakan maupun aturan yang kurang mendukung partisipasi.
2. Hambatan internal dari masyarakat, seperti kurang inisiatif, kurang terorganisir dan kapasitas yang kurang memadai untuk terlihat secara produktif dalam proses pengambilan keputusan.
3. Hambatan yang disebabkan karena metode dan teknik-teknik kurang dikuasai.

2.1.2.3 Pengukuran Partisipasi Masyarakat

Solekhan (2014:153) menyatakan bahwa indikator partisipasi masyarakat yaitu:

1. Pengambilan keputusan yaitu penentuan alternatif dengan masyarakat menuju kesepakatan dari berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama.
2. Pelaksanaan yaitu penggerakan sumber daya dan dana. Dalam pelaksanaan merupakan penentu keberhasilan program yang dilaksanakan.
3. Pengambilan manfaat yaitu partisipasi berkaitan dengan kualitas hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai.
4. Evaluasi yaitu berkaitan dengan pelaksanaan secara menyeluruh dalam partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program berjalan dengan semestinya.

2.1.3 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

2.1.3.1 Pengertian Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas publik yaitu tugas seorang pemilik (agent) untuk memberikan tanggungjawab, menyuguhkan, melaporkan dan mengungkapkan semua aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada orang pemberi amanah (Mardiasmo:2018). Akuntabilitas sebagai kendali penuh bagi aparatur pengelola dana desa terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan maka posisi pemerintah yaitu agen merupakan elemen utama dalam mempertanggungjawabkan performa pemerintahan kepada masyarakat (Widyatama etal, 2017).

Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa yang telah disalurkan kepada pengelola desa. Pengelolaan dana desa ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban.

Jadi dapat disimpulkan menurut penulis bahwa akuntabilitas sebagai kendali penuh bagi aparatur desa dalam pengelolaan dana desa terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

2.1.3.2 Jenis-Jenis Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo 2009, Akuntabilitas terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Akuntabilitas Vertikal (Vertical Accountability), akuntabilitas pada otoritas yang lebih tinggi, misalnya akuntabilitas pada kepala dinas kepada bupati atau walikota, menteri, kepada presiden, kepada kepala cabang dan kepala CEO.

2. Akuntabilitas Horizontal (Horizontal Accountability), akuntabilitas kepada publik secara luas atau terhadap sesama lembaga lainnya yang tidak memiliki hubungan atasan dan bawahan.

2.1.3.3 Pengukuran Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo 2018, yang mengutip dari Elwood 1993 yaitu:

- a. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas kejujuran adalah terkait dengan penghindaran korupsi dan kolusi serta penyalahgunaan jabatan, sedangkan Akuntabilitas Hukum terkait dengan adanya jaminan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik berdasarkan undang-undang.

- b. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas ini berkaitan dengan prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan tugas yang sudah cukup baik atau belum termasuk sistem informasi akuntansi, manajemen hingga prosedur administrasi.

- c. Akuntabilitas program

Akuntabilitas ini berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang diterapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya minimal.

d. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas ini terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga tersebut hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampaknya.

2.1.3.4 Pengelolaan Dana Desa

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.

Pengelolaan Dana Desa dilaksanakan berdasarkan asas-asas yang terdapat dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Akuntabel disini diartikan dalam suatu prinsip bisnis yang mengajarkan mengenai transparansi kinerja.

2.1.3.5 Tahapan Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tahapan pengelolaan dana desa sebagai berikut:

1. Perencanaan, dalam hal ini pembangunan desa oleh pemerintahan desa sesuai dengan perencanaan dan pembangunan kota/kabupaten. Perencanaan yang meliputi RPJM desa yang disusun secara berjangka.
2. Pelaksanaan, prioritas belanja desa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang telah disetujui dalam musyawarah desa serta sesuai dengan prioritas pemerintahan pusat dan provinsi.
3. Penatausahaan, dalam hal keuangan desa yaitu kegiatan pencatatan yang dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Kaur keuangan wajib melakukan pencatatan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran.
4. Pelaporan ini terdiri dari laporan pelaksanaan APB desa dan laporan realisasi anggaran. Laporan tersebut disusun oleh kepala desa dengan cara menggabungkan seluruh laporan yang dipertanggungjawabkan.

2.1.4 Kajian Empiris

Pada penelitian ini penulis juga mengambil beberapa referensi dari hasil penelitian terdahulu sebagai gambaran untuk mempermudah proses penelitian.

Bahan referensi tersebut antara lain:

Atininingsih dan Suci, (2019) meneliti mengenai Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Partisipasi Masyarakat dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa di Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali). Hasil penelitiannya bahwa kompetensi aparatur desa, partisipasi masyarakat dan

sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Sarifudin Mada, (2017) meneliti mengenai Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintahan Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana di Kabupaten Gorontalo. Hasil penelitiannya bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Anita Wijayanti, (2020) meneliti Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Grogol Kabupaten Sukarjo. Hasil penelitiannya bahwa kompetensi aparatur desa dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sedangkan sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Sarah Siti, (2019) meneliti mengenai Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Indragiri Hulu. Hasil penelitian bahwa kompetensi aparatur desa dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sedangkan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap

akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Periansya Periansya, (2020) meneliti mengenai Dampak Kompetensi Aparatur Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Rambutan Banyuasin. Hasil penelitian bahwa Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh nyata dan penting terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa kemudian Partisipasi Masyarakat Desa juga bermanfaat dan penting terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Sedangkan secara bersama-sama Kompetensi Aparatur Desa dan Partisipasi Masyarakat Desa bermanfaat dan penting terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Ni Made Rita Sari dan Kadek Dewi Padnyawati, (2020) meneliti mengenai Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Kantor Desa Se-Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Hasil penelitian bahwa kompetensi aparatur desa dan partisipasi masyarakat berpengaruh nyata dan penting terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Dwi Sapartiningsih, Suharno & Djoko Kristianto (2018) meneliti mengenai Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran dan Pengawasan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pemerintah Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen. Hasil penelitian bahwa Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan

Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran dan Pengawasan berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Filda Gean Rosiana Dewi dan Sapari, (2020) meneliti mengenai Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Transparansi, Kebijakan Desa, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Pada Desa Dahanrejo Kecamatan Kebomas, Gresik. Hasil penelitian bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa serta Partisipasi Masyarakat tidak mempengaruhi Pembangunan Desa. Di sisi lain, Transparansi berdampak positif bagi Pembangunan Desa. Demikian juga Kebijakan Desa berpengaruh positif terhadap Pembangunan Desa.

Astri Juainita Makalalag, Grace B Nangoi dan Herman Karamoy, (2017) meneliti mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. Hasil penelitian bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan sudah terlaksana dan terpenuhi dalam hal transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Meskipun ada beberapa pembiaran yang tetap dilakukan oleh perangkat desa dan pelaksana teknis. Secara keseluruhan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme ketentuan.

Yasmi Nurdin, (2019) meneliti mengenai Pengaruh Kompetensi Akuntansi Aparat Pengelola Dana Desa dan Komitmen Organisasi Pemerintahan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada

Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. Hasil penelitian bahwa Akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh variabel kompetensi akuntansi aparat pengelola dana desa dan komitmen organisasi pemerintah desa, selebihnya dipengaruhi oleh variable lain.

Anam Masruhin, M. Elfan Kaukab, (2019) meneliti mengenai Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo. Hasil penelitian Pelampung Sumber Daya Manusia berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana desa, Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan, Peringatan Organisasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan, Partisipasi berpengaruh pada masyarakat positif dan signifikan.

Putri Aulia dan Restu Agusti, (2018) meneliti mengenai Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Harau, Kecamatan Pangkalan Kota Baru dan Kecamatan Kapur IX. Hasil penelitian bahwa Kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, Komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, Pemanfaatan

Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

I Putu Julianto, (2019) meneliti mengenai Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Penggunaan Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Pendamping Desa Serta Komitmen Pemerintah Daerah Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Buleleng. Hasil penelitian bahwa Partisipasi Masyarakat, Penggunaan Sistem Keuangan Desa dan Kompetensi Pendamping positif signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Tarjo Tarjo, (2019) meneliti mengenai Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Dana Desa Pada Desa Muara Niro Kecamatan VII Konto Kabupaten Tebo. Hasil penelitian bahwa secara parsial Parsial pengaruh Kompetensi Perangkat desa H1 terhadap Akuntabilitas Dana Desa, terbukti berpengaruh signifikan dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. H2 pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Dana Desa nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ maka H2 terbukti berpengaruh signifikan. Secara simultan pengaruh H3 Kompetensi Perangkat Desa dan Komitmen Organisasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan dengan nilai $0,000 < 0,055$.

Larastika Medianti, (2018) meneliti mengenai Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi dan Partisipasi Masyarakat

Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Desa-Desa di Kabupaten Bintan. Hasil penelitiannya bahwa Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Asri Eka Ratih, (2018) meneliti mengenai Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dan Peran Serta BPD Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa Di Teluk Sebong dan Teluk Bintan. Hasil penelitiannya bahwa semakin tinggi Kompetensi yang dimiliki Aparatur Desa dan Peran BPD maka akan semakin baik kualitas Laporan Keuangan yang disajikan.

Suryo Pratolo, (2020) meneliti mengenai Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa dan Otonomi Desa pada Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partisipasi Masyarakat berpengaruh langsung terhadap Pengelolaan Dana Desa dan berpengaruh tidak langsung terhadap Otonomi Desa melalui Pengelolaan Dana Desa sebagai variabel intervening. Sedangkan Kompetensi Aparat Pemerintah Desa hanya berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa.

Muhammad Nur Aziz (2019), meneliti mengenai Faktor-Faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa pada Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Talunggung. Hasil penelitiannya bahwa Aparatur Pemerintahan desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan SPIP berpengaruh terhadap Akuntabilitas Dana Desa.

Siti Umaira (2019), meneliti mengenai Pengaruh Partisipasi

Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Kabupaten Aceh Barat Daya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengawasan baik secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Rahmi Kurnia (2019), meneliti mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perencanaan sudah menerapkan prinsip Partisipasi dan Transparasi, namun penyusunan perencanaan Dana Desa dan APBDes tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu

No	Penelitian, Tahun dan Tempat (1)	Persamaan (2)	Perbedaan (3)	Hasil Penelitian (4)	Sumber (5)
1.	Atiningsih dan Suci, (2019) Pada Desa di Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali)	-Variabel X: Kompetensi Aparatur Desa, Partisipasi Masyarakat -Variabel Y: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	-Variabel X: Sistem Pengendalian Internal -Teknik Pengumpulan Sampel: Random Sampling -Metode Analisis Data; Analisis Regresi Linier Berganda	Kompetensi Aparatur Desa, Partisipasi Masyarakat dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan : Volume 10, Nomor 1, (2019) e-ISSN : 2656-4440
2	Sarifudin Mada, (2017) Pada Desa di Kabupaten Gorontalo	-Variabel X: Partisipasi Masyarakat -Variabel Y: Akuntabilitas Pengelolaan	-Variabel X: Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa	Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana	Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing: Volume 8, Nomor 2, (2017)

		Dana Desa -Teknik Pengumpulan Data: Kuesioner		Desa	e-ISSN: 35800-17199
3	Anita Wijayanti, (2020) pada Desa di Kecamatan Grogol Kabupaten Sukarjo	-Variabel X: Kompetensi Aparatur Desa dan Partisipasi Masyarakat -Variabel Y: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	-Variabel X: Sistem Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi -Teknik Pengumpulan Data: Analisis Regresi Linier Berganda	Kompetensi Aparatur Desa dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sedangkan Sistem Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh signifikan.	Indonesia Accounting Journal: Volume 2, Nomor 2 (2020) e-ISSN: 324000-29261
4	Sarah Siti, (2019) Pada Desa di Kabupaten Indragiri Hulu	-Variabel X: Kompetensi Aparatur Desa dan Partisipasi Masyarakat -Variabel Y: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa -Analisis Data: Analisis Regresi Linier Berganda	-Variabel X: Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi -Analisis Data: Analisis Regresi Linier Berganda	Kompetensi Aparatur Desa dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Sedangkan Komitmen Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh signifikan,	Jurnal Ilmiah Akuntansi: Volume 4, Nomor 4, (2020) i-ISSN: 2549-5704
5	Periansya Periansya, (2020) Pada Desa di Kabupaten Banyuasin	-Variabel X: Kompetensi Aparatur Desa dan Partisipasi Masyarakat -Variabel Y: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	-Teknik Pengumpulan Data: Purpose Sampling	Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh nyata terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sedangkan Partisipasi Masyarakat bermanfaat bagi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Jurnal Riset Terapan Akuntansi: Volume 4, Nomor 1, (2020) e-ISSN: 2622-7940 p-ISSN: 2579-969X
6	Ni Made Rita Sari dan Kadek Dewi Padnyawati, (2020) Pada Kantor Desa Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan	-Variabel X: Kompetensi Aparatur Desa dan Partisipasi Masyarakat -Variabel Y: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	-Variabel X: Komitmen Organisasi Pemerintahan Desa	Kompetensi Aparatur Desa dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Hita Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia: Volume 26 Nomor 2 Februari (2019) e-ISSN: 1269-

					1298.
7	Dwi Sapartiningsih, Suharno & Djoko Kristianto (2018) Pada Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen	-Variabel Y: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	-Variabel X: Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran dan Pengawasan -Metode Pengumpulan Data: Angket atau Dokumentasi	Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran dan Pengawasan berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi: Volume 14, Nomor 1, (2018) e-ISSN: 2655-156X p-ISSN: 1693-7635
8	Filda Gean Rosiana Dewi dan Sapari, (2020) Pada Desa Dahanrejo Kecamatan Kebomas, Gresik	-Variabel X: Partisipasi Masyarakat -Teknik Pengumpulan Data: Kuesioner	-Variabel X: Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Transparansi dan Kebijakan Desa -Variabel Y: Pembangunan	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa serta Partisipasi Masyarakat tidak berpengaruh signifikan sedangkan Transparansi dan Kebijakan berpengaruh positif signifikan terhadap Pembangunan	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi: Volume 9, Nomor 5, (2020) e-ISSN: 2460-0585
9	Astri Juainita Makalalag, Grace B Nangoi dan Herman Karamoy, (2017) Pada Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan	-Variabel Y: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	-Jenis Penelitian: Eksploratif Kualitatif -Teknis Analisis Data: Analisis Regresi Linier Berganda	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan sudah terlaksana dalam hal Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipatif	Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing: Volume 8, Nomor 1 (2017) e-ISSN: 35800-15334
10	Yasmi Nurdin, (2019) Pada Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai	-Variabel Y: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa -Teknik Pengumpulan Data; Kuesioner	-Variabel X: Kompetensi Akuntansi Aparat Pengelola Dana Desa dan Komitmen Organisasi Pemerintah -Analisis Data: Aplikasi SPSS 21 for windows	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dipengaruhi oleh variabel Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa dan Komitmen Organisasi Pemerintah desa, selebihnya dipengaruhi oleh variabel lain	Accountinting, Accountability and Organization System (AAOS) Journal: Volume 1 Nomor 1, Sept (2019) e-ISSN: 2716-2125
11	Anam Masruhin, M. Elfan Kaukab, (2019) Pada Perangkat Desa Di Kecamatan	-Variabel X: Partisipasi Masyarakat -Variabel Y: Akuntabilitas Pengelolaan	-Variabel X: Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal dan Komitmen	Pelampung Sumber Daya Manusia berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Sistem	Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan: Volume 10, Nomor 2 (2020)

	Mojotengah Kabupaten Wonosobo	Dana Desa -Metode Pengambilan Data: kuesioner	Organiisasi -Penentuan sampel: Non probability -	Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan	e-ISSN: 2665-3266 p-ISSN: 2337-408X
12	Putri Aulia dan Restu Agusti, (2018) Pada Kecamatan Harau, Kecamatan Pangkalan Kota Baru dan Kecamatan Kapur IX	-Variabel X: Partisipasi Masyarakat -Variabel Y: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa -Metode Pengambilan Data: Kuesioner	-Variabel X: Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintahan Desa dan Pemanfaatan Teknologi	Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat sama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Jurnal Online Mahasiswa: Volume 1, Nomor 1, (2018) e-ISSN: 2355-6854
13	I Putu Julianto, (2019) Pada Desa di Kabupaten Buleleng	-Variabel X: Partisipasi Masyarakat -Variabel Y: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa -Metode pengumpulan Data: Kuesioner Dan Primer	Variabel X: Penggunaan Sistem Keuangan Desa, Komitmen Pemerintahan Desa	Partisipasi Masyarakat, Penggunaan Sistem Keuangan Desa, Komitmen Pemerintahan Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Jurnal Ilmiah Akuntansi: Volume 4, Nomor 1, (2019) e-ISSN: 2528-1399 p-ISSN: 2527-4090
14	Tarjo Tarjo, (2019) Pada Desa Muara Niro Kecamatan VII Kabupaten Tebo	-Variabel X: Kompetensi Aparatur Desa -Variabel Y: Akuntabilitas Pengelolaan Dana	-Variabel X: Komitmen Organisasi -Teknik Pengambilan Simple: Random Sampling -Metode Analisis Data: Analisis Regresi Linier Berganda	Hasil yang diperoleh dari Kompetensi Aparatur Desa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas Dana Desa	Jurnal Ilmiah Tata Sejuta: Volume 5, Nomor 2, (2019) e-ISSN: 2615-0670
15	Larastika Medianti, (2018) Pada Desa-Desa Di kabupaten Bintan	-Variabel X: Kompetensi Aparatur Desa, Partisipasi Masyarakat -Variabel Y: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	-Variabel X: Komitmen Organisasi -Teknik Pengumpulan Data: Purposive Sampling - Metode Analisis Data: Analisis Regresi Linier Berganda	Kompetensi Aparatur desa, komitmen Organisasi dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Jurnal Online Mahasiswa: Volume 1, Nomor 1, (2018) e-ISSN: 2355-6854
16	Asri Eka Ratih, (2018) Pada	-Variabel X: Kompetensi	-Variabel X: Peran Serta BPD	Semakin tinggi Kompetensi	Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan

	Desa di Teluk Sebong dan Teluk Bintan	Aparatur Desa	-Variabel Y: Kualitas Laporan Keuangan	Aparatur Desa dan Peran BPD, maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang disajikan	Finansial Indonesia: Volume 2, Nomor 1, (2018) e-ISSN: 2684-8244 p-ISSN: 2598-5035
17	Suryo Pratolo, (2020) Pada Pemerintahan daerah di Sleman, Yogyakarta	-Variabel X: Partisipasi Masyarakat dan Kompetensi Aparatur Desa	-Variabel Y: Pengelolaan Dana Desa dan Otonomi Desa	Partisipasi Masyarakat berpengaruh langsung terhadap Pengelolaan Dana Desa dan berpengaruh tidak langsung terhadap Otonomi Desa melalui Pengelolaan Dana Desa sebagai Variabel Intervening. Sedangkan Kompetensi Aparatur Pemerinatah Desa hanya berpengaruh langsung terhadap Pengelolaan Danma Desa	Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis: Volume 7, Nomor 1,(2020) e-ISSN: 2528-1143
18	Muhammad Nur Aziz (2019) Pada Kecamatan Sumbergempol , Kabupaten Talungung	-Variabel Y: Akuntabilitas Dana Desa	-Variabel X: Faktor-faktor yang mempengaruhi -Metode Analisis Data: Analisis Regresi Linier Berganda	Kompetensi Aparatur Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan SPIP berpengaruh terhadap Akuntabilitas Dana Desa	Jurnal Akuntansi Akrual: Volume 6, Nomor 2, (2019) e-ISSN: 25801015
19	Siti Umaira (2019) Pada Desa di Kabupaten Aceh Barat Daya	-Variabel X: Partisipasi Masyarakat -Variabel Y: Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa	-Variabel X: Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengawasan -Metode Analisis Data: Analisis Regresi Linier Berganda	Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan pengawasan baik secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi: Volume 4, Nomor 3, (2019) e-ISSN: 2581-1002
20	Rahmi Kurnia (2019) Pada Desa di Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten	-Variabel Y: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa -Teknik Pengumpulan	-Metode Penelitian: Kualitatif dengan tipe deskriptif	Perencanaan sudah menerapkan prinsip Partisipasi dan Transparansi, namun penyusunan Perencanaan Dana Desa dan APBDes	Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA): Volume 1, Nomor 1, (2019)

Pasaman Barat	Data: Observasi dan kuesioner		tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan	e-ISSN: 2656-3649
---------------	-------------------------------	--	---	-------------------

Sumber: Data Diolah Peneliti

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 6 otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah.

(Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014).

Kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seseorang berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Sehingga seseorang tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara fektif dan efisien. Wyatt dan suparyadi (2015)

Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan, dimulai dari kegiatan perencanaan sampai dan pelaksanaan sampai dengan tahap evaluasi. Solekhan (2014:141)

Kompetensi aparatur desa dan partisipasi masyarakat saling

berkaitan karena di dalam pemerintahan yang memiliki komitmen terhadap pelayanan publik yaitu kompetensi aparatur desa. hal ini sejalan dengan *Stewardship theory* dimana aparatur desa yang memiliki komitmen yang tinggi untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan layanan publik.

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh sulfiana (2022) bahwasannya Kompetensi Aparatur desa memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Partisipasi Masyarakat.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa adalah Pertanggung jawaban atas keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Solekhan (2014:228) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting untuk pembangunan akuntabilitas karena dengan adanya partisipasi masyarakat dapat memberikan ruang kepada masyarakat dalam hal menilai kinerja pemerintahan.

Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dikarenakan semakin tinggi tingkat kemampuan kompetensi pada aparat desa maka akan meningkat pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Des. Aparat desa yang memiliki kompetensi tinggi akan mampu mengelola dana desa dengan baik. Pahlawan (2020).

Hal ini di dukung dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Yennsa (2020), Aziz dan Prastiti (2019). Jika aparat desa berkompeten dalam mengelola dana desa maka akan meningkat pula akuntabilitas pengelolaan dana desa tersebut.

Terdapat keterkaitan antar variabel partisipasi masyarakat yang memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Menurut Devas dan Grant (2019) , menyatakan bahwa akuntabilitas dapat diperkuat dengan adanya partisipasi masyarakat. Peran masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan dapat meningkatkan kinerja pemerintahan desa secara efektif, efisien dan akuntabel.

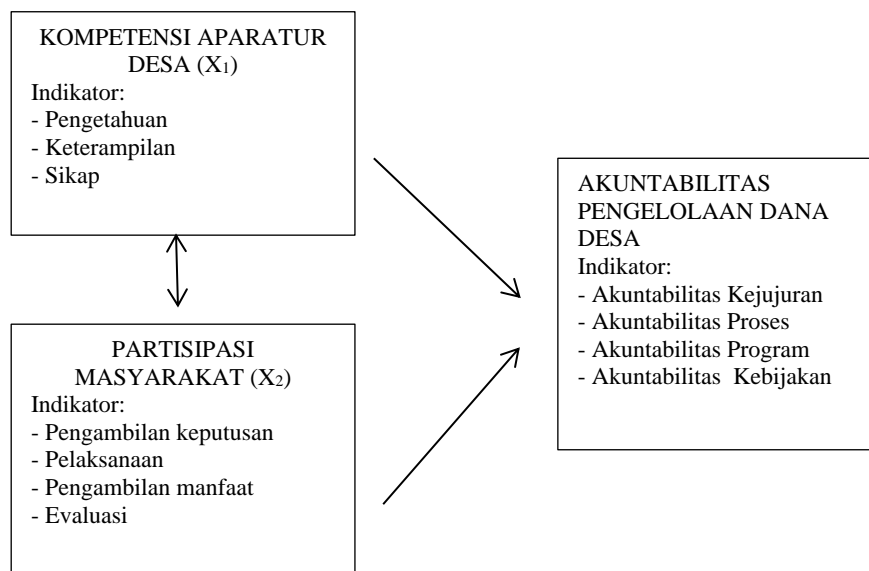
Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aulia (2018), Dewi dan Gayatri (2019), Nora Angelta (2019) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Terdapat keterkaitan antara kompetensi aparatur desa dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan demikian apabila kompetensi aparatur desa dan partisipasi masyarakat diterapkan dengan baik secara bersama, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan meningkat menjadi lebih baik. Hal ini sejalan dengan pendapat Pahlawan (2020) semakin tinggi tingkat kemampuan kompetensi maka akan meningkat pula akuntabilitas pengelolaan dana desanya. Menurut Devas dan Grant (2019) peran

masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan dapat meningkatkan kinerja pemerintah dalam mengelola dana desa.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Umaira dan Adnan (2019) dan Nora Angelta (2019). Terdapat pengaruh positif antara kompetensi aparatur desa dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan uraian diatas dari judul penelitian: Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Maka kerangka pemikirannya digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Sugiyono (2019: 99) mengungkapkan bahwa pengertian hipotesis adalah : “Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Yang dimaksud sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan belum berdasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris.

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas maka pengujian hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Terdapat hubungan antara Kompetensi Aparatur Desa dengan Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya.
2. Terdapat pengaruh antara Kompetensi Aparatur Desa dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Tasikmalaya secara Parsial.
3. Terdapat pengaruh antara Kompetensi Aparatur Desa dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Tasikmalaya secara Simultan